

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviutas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Kinerja Sekretariat DPRD diukur atas dasar penilaian indicator kinerja utama (IKU) yang merupakan indicator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatandan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan system administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Dalam penyusunan LKJiP Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Sekretariat DPRD sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan diharapkan LKJiP Sekretariat DPRD pada tahun 2022 sudah mencerminkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022.

Pamekasan, 14 Februari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN

MASRUKIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19691104 199003 1 005
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	12
D. Landasan Hukum	13
E. Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Capaian Kinerja Organisasi	50
B. Realisasi Anggaran	54
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	61
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DPRD	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	3
------------	---------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	32
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan	37
Tabel 2.6	Perubahan Program dan Kegiatan (<i>refocusing</i>)	40
Tabel 2.7	Perubahan Program dan Kegiatan (PAK)	44
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	49
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utam	50
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	51
Tabel 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	52
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan	53
Tabel 3.6	Capaian Anggaran, Program dan Kegiatan	54
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja , Anggaran, Tujuan dan Sasaran	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku unsure pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub system dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telahditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. StrukturOrganisasi dan Tata Kerja

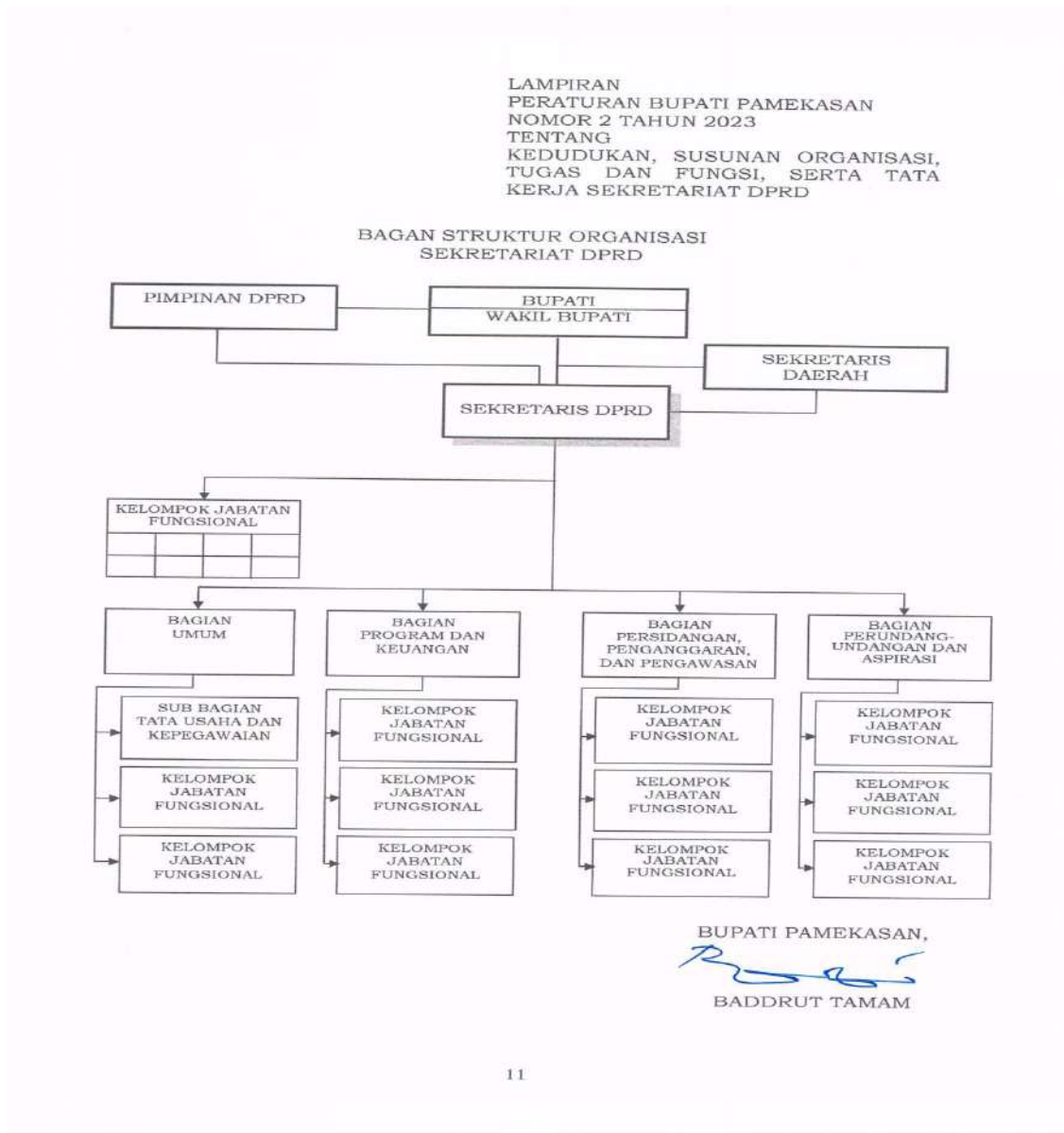
Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan, maka Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- Menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas,disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Sekretaris DPRD sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan meliputi unsur pimpinan yaitu Sekretaris DPRD, Unsur pelaksana antara lain:

- a. Bagian Umum, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Bagian Program dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagian Persidangan, Penganggaran dan Pengawasan membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bagian Perundang-undangan dan Aspirasi membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD dan Staf Ahli adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Tugas: Menyelenggarakan administrasi kesekretarisan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Penilaian Kinerja Bawahan;
- f. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Umum

Tugas : Melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan serta Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- b. Pembinaan tata laksana, system dan mekanisme kerja organisasi, serta pelaksanaan Koordinasi;
- c. Penyelenggaraan Urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan Sarana dan Prasana Keperluan DPRD;
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;
- g. Penilaian Kinerja Bawahan;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perencanaan

Tugas :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan dinas;
- d. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- e. Menilai kinerja bawahan;
- f. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum sesuai dengan tugasnya.

3. Bagian Program dan Keuangan

Tugas: mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di Bagian Program dan Keuangan

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Penyelenggaraan Penatausahaan keuangan;
- c. Penyelenggaraan verifikasi dan akuntansi keuangan;
- d. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan keuangan DPRD;
- e. Penilaian kinerja bawahan;
- f. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Pengoordinasian, penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan sekretariat DPRD; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bagian Persidangan, Penganggaran, dan Pengawasan

Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di Bagian Persidangan, Penganggaran, dan Pengawasan

Fungsi :

- a. Pembahasan kebijakan anggaran;
- b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Peningkatan kapasitas DPRD;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
- e. Perencanaan program kerja DPRD;
- f. Fasilitasi penyelenggaraan persidangan DPRD;
- g. Menilai kinerja bawahan;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

5. Bagian Perundang-undangan dan Aspirasi

Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di Bagian Perundang-undangan dan Aspirasi

Fungsi :

- a. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
- b. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;
- c. Pembahasan kerjasama daerah;
- d. Fasilitasi tugas DPRD;
- e. Penyusunan rencana jadwal pembahasan perundang-undangan dan aspirasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perundang-undangan;
- g. Penyiapan draft produk perundang-undangan;

- h. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian draft produk perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik;
- j. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- k. Penyiapan bahan pembahasan aspirasi;
- l. Pengoordinasian, pencatatan, dan pelaporan hasil pembahasan aspirasi;
- m. Pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan reses anggota DPRD;
- n. Pendokumentasian produk hukum daerah; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- b) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Bagian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian dengan keahlian dan kebutuhan.

a. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat DPRD periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Masih rendahnya rasa keterwakilan rakyat oleh Lembaga DPRD;
2. Munculnya program baru yang tidak didukung dengan pendanaan yang memadai;
3. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
4. Kurangnya personalia dan dukungan sarana prasarana penunjang yang memadai serta penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis;
5. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
4. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis ke pada DPRD;
5. Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan target kinerja DPRD Kabupaten Pamekasan karena

Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pamekasan sehingga bertambah atau menurunnya target kinerja DPRD terhadap jumlah Peraturan Daerah sebagaimana RPJMD tahun 2013-2018 yang dihasilkan setiap tahunnya bukan menjadi kewenangan Sekretraiat DPRD.

b. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini disusun berdasarkan beberapa landasan hokum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunnya itu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan
Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

Terdapat beberapa pokok-pokok visi antara lain:

- *Pamekasan Rajjha*, artinya merupakan gambaran tata kelolakota yang didasarkan pada karakter lokal, rapi, asri, memiliki nilai estitika tinggi, serta memiliki perspektif ekonomis dan sustainability.
- *Pamekasan Bajjhra*, artinya konsep keberuntungan dalam bahasa Madura. Tujuan akhir dari pembangunan jangka menengah Pamekasan, dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan bagi masyarakat Pamekasan, khususnya keberuntungan secara ekonomis.
- *Pamekasan Parjhuga*, artinya merupakan konsep dalam bahasa Madura yang menggambarkan seorang individu yang memiliki kecakapan, baik kecakapan fisik, psikologis, estetis, maupun teologis.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- 1) Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- 2) Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri Manufaktur Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 4) Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Berkualitas dan Merata.
- 5) Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023 merupakan salah satu SKPD Misi ke-3, yaitu *“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”* dengan tujuan ke-1 RPJMD 2018-2023 *“Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif dan akuntabel”* dan dengan sasaran RPJMD 2018-2023 *“Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel dalam memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”*.

Berdasarkan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018 - 2023, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yakni:

- 1) Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur, baik aspek intelektual, administrasi dan manajemen, melalui kegiatan pelatihan;
- 2) Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat;

- 3) Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secaranyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian				
				(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
Sebelum Perubahan									
1	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD		Indeks Pelayanan Publik (DPRD)		75	78	80	82	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP OPD	A	A	A	A	A	A
			Prosentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya		80%	80%	85%	90%	95%
		Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD)		75%	75%	80%	82%	83%
Setelah Perubahan									
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Publik (IPP)				80	85	90
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase Pelayanan Anggota DPRD yang tercapai				80%	85%	90%

Sumber :Perubahan Renstra Sekretariat DPRD periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 188/10.A/432.100/2022
Tanggal : 6 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan
Tujuan	: Mewujudkan dukungan layanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD
Tugas	: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan2. Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">a. Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan DPRDb. Menyelenggarakan administrasi DPRDc. Fasilitasi penyelenggaraan DPRDd. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan tata kelola pendukung pelaksanaan layanan urusan organisasi perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik	$\frac{\text{Nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{Nilai F03}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \text{Bobot Perindikator}$ Nilai Per Aspek = $\sum \text{nilai per indikator}$ Nilai Indeks = $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$	1. Desk Evaluation 2. Observasi Lapangan 3. Kuesioner dan/atau 4. Wawancara	Data Sekretariat DPRD
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD)	$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9}$ $= 0.11$ $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ SKM Unsur Pelayanan x 25	Kuisisioner Data	Sekretariat DPRD
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP OPD	>80-90 (A)	LHE SAKIP OPD	Sekretariat DPRD

Sumber :Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Sekretariat DPRD Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Tahun	
									Target	Rp.
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas								Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah							Nilai SAKIP		
		4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	85%	Rp 33,953,807,720
								Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		

							Persentase peningkatan kompetensi aparatur		
							Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas		
		4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	85%	Rp 144,705,000
		4	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	Rp 44,275,000
		4	02	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 dokumen	Rp 50,930,000
		4	02	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	5 kali	Rp 49,500,000
		4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	85%	Rp 28,662,118,519
		4	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan yang terlaksana	28 kali	Rp 28,442,118,519
		4	02	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pertanggungjawaban yang diverifikasi	48 Sub Kegiatan	Rp 101,000,000

		4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang terlaksana	14 kali	Rp 55,000,000
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	20 kali	Rp 55,000,000
		4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12 kali	Rp 110,000,000
		4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	85%	Rp 20,000,000
		4	02	01	2.02	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang di inventarisir	21 jenis	Rp 20,000,000
		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	85%	Rp 164,824,000
		4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	36 aparatur	Rp 164,824,000
		4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	17 jenis	Rp 392,620,602
		4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	55 komponen	Rp 27,499,670

		4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	16 jenis	Rp 54,998,977
		4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	11 jenis	Rp 92,913,480
		4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5 jenis	Rp 159,414,475
		4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	3 jenis	Rp 60,000,000
		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	8 kali	Rp 57,794,000
		4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	85%	Rp 856,969,300
		4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2 unit	Rp -
		4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	5 jenis	Rp -
		4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	8 jenis	Rp 856,969,300
		4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	85%	Rp 427,635,756

		4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1300 kali	Rp 157,784,000
		4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Non ASN yang disediakan	25 orang	Rp 300,000,000
		4	02	01	0.08889	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	36 kali	Rp 269,851,756
		4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	85%	Rp 1,719,092,164
		4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 kendaraan	Rp 691,901,100
		4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	14 ruangan	Rp 807,335,824
		4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	11 jenis	Rp 219,855,240
		4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	85%	Rp 621,497,140
		4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang terlaksana	12 kali	Rp 288,748,790
		4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2 jenis	Rp 283,256,600
		4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	1 kali	Rp 49,491,750

		4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	85%	Rp 964,345,239
		4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang terlaksana	436 kali	Rp 258,499,439
		4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	436 kali	Rp 705,845,800
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD							Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang tercapai		
		4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	85%	Rp 23,766,351,713
		4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	85%	Rp 4,860,294,203
		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah agenda penyusunan dan pembahasan perda yang terlaksana	5 kali	Rp 774,950,000
		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terbentuk	19 raperda	Rp 2,821,500,000
		4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang terlaksana	5 kali	Rp 557,644,615
		4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tata tertib DPRD yang tersusun	1 tatib	Rp 706,199,588

		4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase jumlah perda yang dibahas	85%	Rp 75,000,000
		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah jadwal pembahasan APBD yang dilakukan	1 perda	Rp 25,000,000
		4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah jadwal pembahasan APBD perubahan yang dilakukan	1 perda	Rp 25,000,000
		4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah jadwal pembahasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan	1 perda	Rp 25,000,000
		4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	85%	Rp 45,000,000
		4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah keputusan DPRD yang dibuat	1 Keputusan DPRD	Rp 25,000,000
		4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	1 Rekomendasi DPRD	Rp 20,000,000
		4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	85%	Rp 3,254,136,573
		4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK	45 anggota	Rp 2,672,801,973
		4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang tersusun	10 jenis	Rp 66,550,000
		4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	10 tenaga ahli	Rp 329,991,200
		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	7 tenaga ahli	Rp 184,793,400

		4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	85%	Rp 3,560,726,923
		4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang terlaksana	576 kali	Rp 1,502,049,808
		4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Usulan Pokok Pikiran Dewan yang terakomodir	45 usulan	Rp 54,999,780
		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkala (per semester)	135 anggota	Rp 2,003,677,335
		4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	85%	Rp 724,488,500
		4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Pelaksanaan Peyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	300 kali	Rp 724,488,500
		4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	85%	Rp 11,366,705,515
		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas anggota DPRD yang terkoordinasi dan terkonsultasikan	168 kali	Rp 11,366,705,515
TOTAL ANGGARAN										Rp 57,720,159,432

Sumber : Perubahan Renstra Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pamekasan, yang mana telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

**Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Pamekasan Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas			Indeks Pelayanan Publik (IPP)		

	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	Persen	85
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur		
			Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	85
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	4
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	Kali	5
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	%	85
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan yang terlaksana	Kali	28
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Sub Kegiatan	48
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang terlaksana	Kali	14
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Kali	20

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Kali	12
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	%	85
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang di inventarisir	Jenis	21
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	%	85
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Aparatur	36
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	Jenis	17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Komponen	55
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	16
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Jenis	11
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	5
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Jenis	3
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	Kali	8
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	%	85
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Unit	2
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Jenis	5

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Jenis	8
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	%	85
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Kali	1300
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Non ASN yang disediakan	Orang	25
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kali	36
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	85
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan	20
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Ruangan	14
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	Jenis	11
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	%	85
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang terlaksana	Kali	12
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Jenis	2
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	Kali	1

		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	%	85
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang terlaksana	Kali	436
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	Kali	436
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD		Persentase Pelayanan Sekertariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang tercapai		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terasilitasi	%	85
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	%	85
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah agenda penyusunan dan pembahasan perda yang terlaksana	Kali	5
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terbentuk	Raperda	19
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang terlaksana	Kali	5
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tata tertib DPRD yang tersusun	Tatib	1
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase jumlah perda yang dibahas	%	85
		Pembahasan APBD	Jumlah jadwal pembahasan APBD yang dilakukan	Perda	1
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah jadwal pembahasan APBD perubahan yang dilakukan	Perda	1

		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah jadwal pembahasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan	Perda	1
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	%	85
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah keputusan DPRD yang dibuat	Keputusan DPRD	1
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	Rekomendasi DPRD	1
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	85
		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK	Anggota	45
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang tersusun	Jenis	10
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	Tenaga Ahli	10
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	Tenaga Ahli	7
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	%	85
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang terlaksana	Kali	576
		Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Usulan Pokok Pikiran Dewan yang terakomodir	Usulan	45
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkala (per semester)	Anggota	135
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	%	85
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kali	300

		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	%	85
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas anggota DPRD yang terkoordinasi dan terkonsultasikan	Kali	168

Sumber :Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat DPRD :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	2022	
				Target	Rp.
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas			Indeks Pelayanan Publik (IPP)		53,829,458,222
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	85%	32,538,681,122
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur		

			Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	85%	153,000,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	51,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	51,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	5 Kali	51,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	85%	3,714,292,560
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan yang terlaksana	28 Kali	3,303,479,060
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pertanggungjawaban yang diverifikasi	48 Sub Kegiatan	99,000,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang terlaksana	14 Kali	80,133,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	20 Kali	77,242,500
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12 Kali	154,438,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	85%	20,000,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang di inventarisir	21 Jenis	20,000,000

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	85%	251,000,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	36 Aparatur	251,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	17 Jenis	510,773,250
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	55 Komponen	30,999,700
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	16 Jenis	31,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	11 Jenis	191,276,800
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5 Jenis	144,996,750
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	3 Jenis	60,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	8 Kali	52,500,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	85%	1,679,646,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2 Unit	1,485,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	5 Jenis	10,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	8 Jenis	184,646,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	85%	646,809,000

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1300 Kali	84,035,400
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Non ASN yang disediakan	25 Orang	324,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	36 Kali	238,773,600
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	85%	745,973,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Kendaraan	400,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	14 Ruangan	200,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	11 Jenis	145,973,000
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	85%	24,165,950,747
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang terlaksana	12 Kali	23,864,850,747
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2 Jenis	250,000,000
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	1 Kali	51,100,000
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	85%	651,236,565

		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang terlaksana	436 Kali	69,986,565
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	436 Kali	581,250,000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD		Persentase Pelayanan Sekertariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang tercapai	85%	21,290,777,100
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	85%	21,290,777,100
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	85%	6,892,000,000
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah agenda penyusunan dan pembahasan perda yang terlaksana	5 Kali	1,220,000,000
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terbentuk	19 Raperda	2,750,000,000
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang terlaksana	5 Kali	1,461,000,000
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tata tertib DPRD yang tersusun	1 Tatib	1,461,000,000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase jumlah perda yang dibahas	85%	75,000,000
		Pembahasan APBD	Jumlah jadwal pembahasan APBD yang dilakukan	1 Perda	25,000,000
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah jadwal pembahasan APBD perubahan yang dilakukan	1 Perda	25,000,000

		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah jadwal pembahasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan	1 Perda	25,000,000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	85%	45,000,000
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah keputusan DPRD yang dibuat	1 Keputusan DPRD	25,000,000
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	1 Rekomenda si DPRD	20,000,000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	85%	3,158,625,000
		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK	45 Anggota	2,581,500,000
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang tersusun	10 Jenis	70,125,000
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	10 Tenaga Ahli	315,000,000
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	7 Tenaga Ahli	192,000,000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	85%	1,987,157,100
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang terlaksana	576 Kali	600,000,000
		Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Usulan Pokok Pikiran Dewan yang terakomodir	45 Usulan	50,157,100
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkala (per semester)	135 Anggota	1,337,000,000
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	85%	400,000,000
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	300 Kali	400,000,000

		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	85%	8,732,995,000
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas anggota DPRD yang terkoordinasi dan terkonsultasikan	168 Kali	8,732,995,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2022 terjadi 3 (tiga) kali perubahan yaitu:

1. Pada tanggal 14 April 2022 dilaksanakan perubahan anggaran (refocusing) akibat penyesuaian anggaran yang mana mengakibatkan adanya perubahan anggaran yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. 165,-.

Tabel 2.6
Perubahan Program dan Kegiatan (Refocusing)
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	2022	
				Target	Rp.
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas			Indeks Pelayanan Publik (IPP)		53,829,458,057
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	85%	32,538,680,957
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur		
			Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	85%	153,000,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	51,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	51,000,000

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	5 Kali	51,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	85%	3,714,292,560
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan yang terlaksana	28 Kali	3,303,479,060
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pertanggungjawaban yang diverifikasi	48 Sub Kegiatan	99,000,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang terlaksana	14 Kali	80,133,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	20 Kali	77,242,500
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12 Kali	154,438,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	85%	20,000,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang di inventarisir	21 Jenis	20,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	85%	251,000,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	36 Aparatur	251,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	17 Jenis	510,773,250
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	55 Komponen	30,999,700
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	16 Jenis	31,000,000

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	11 Jenis	191,276,800
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5 Jenis	144,996,750
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	3 Jenis	60,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	8 Kali	52,500,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	85%	1,679,646,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2 Unit	1,485,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	5 Jenis	10,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	8 Jenis	184,646,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	85%	646,809,000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1300 Kali	84,035,400
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Non ASN yang disediakan	25 Orang	324,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	36 Kali	238,773,600
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	85%	745,973,000

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Kendaraan	400,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	14 Ruangan	200,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	11 Jenis	145,973,000
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	85%	24,165,950,747
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang terlaksana	12 Kali	23,864,850,747
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2 Jenis	250,000,000
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	1 Kali	51,100,000
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	85%	651,236,400
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang terlaksana	436 Kali	69,986,400
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	436 Kali	581,250,000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD		Persentase Pelayanan Sekertariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang tercapai	85%	21,290,777,100

		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	85%	21,290,777,100
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	85%	6,892,000,000
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah agenda penyusunan dan pembahasan perda yang terlaksana	5 Kali	1,220,000,000
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terbentuk	19 Raperda	2,750,000,000
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang terlaksana	5 Kali	1,461,000,000
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tata tertib DPRD yang tersusun	1 Tatib	1,461,000,000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase jumlah perda yang dibahas	85%	75,000,000
		Pembahasan APBD	Jumlah jadwal pembahasan APBD yang dilakukan	1 Perda	25,000,000
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah jadwal pembahasan APBD perubahan yang dilakukan	1 Perda	25,000,000
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah jadwal pembahasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan	1 Perda	25,000,000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	85%	45,000,000
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah keputusan DPRD yang dibuat	1 Keputusan DPRD	25,000,000
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	1 Rekomendasi DPRD	20,000,000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	85%	3,158,625,000
		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK	45 Anggota	2,581,500,000

		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang tersusun	10 Jenis	70,125,000
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	10 Tenaga Ahli	315,000,000
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	7 Tenaga Ahli	192,000,000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	85%	1,987,157,100
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang terlaksana	576 Kali	600,000,000
		Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Usulan Pokok Pikiran Dewan yang terakomodir	45 Usulan	50,157,100
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkala (per semester)	135 Anggota	1,337,000,000
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	85%	400,000,000
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	300 Kali	400,000,000
		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	85%	8,732,995,000
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas anggota DPRD yang terkoordinasi dan terkonsultasikan	168 Kali	8,732,995,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (penyesuaian anggaran kembali - relaksasi)

2. Pada tanggal 02 November 2022 dilaksanakan perubahan anggaran dengan rincian perubahan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan (PAK)
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	2022	
				Target	Rp.
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas			Indeks Pelayanan Publik (IPP)		51,491,780,156
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	85%	33,702,003,056
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur		
			Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	85%	253,000,000

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	151,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Dokumen	51,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	5 Kali	51,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	85%	2,764,657,059
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan yang terlaksana	28 Kali	2,428,843,559
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pertanggungjawaban yang diverifikasi	48 Sub Kegiatan	99,000,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang terlaksana	14 Kali	80,133,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	20 Kali	77,242,500
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	12 Kali	79,438,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang Terinventarisasi	85%	20,000,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang di inventarisir	21 Jenis	20,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	85%	251,000,000

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	36 Aparatur	251,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	17 Jenis	655,773,250
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	55 Komponen	30,999,700
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	16 Jenis	41,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	11 Jenis	266,276,800
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5 Jenis	204,996,750
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	3 Jenis	60,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	8 Kali	52,500,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang layak fungsi	85%	2,691,604,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2 Unit	2,436,958,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	5 Jenis	70,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	8 Jenis	184,646,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	85%	697,809,000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1300 Kali	119,035,400

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Non ASN yang disediakan	25 Orang	340,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	36 Kali	238,773,600
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	85%	1,075,972,600
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Kendaraan	649,999,600
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	14 Ruangan	260,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terehabilitasi	11 Jenis	165,973,000
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	85%	24,440,950,747
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang terlaksana	12 Kali	23,939,850,747
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2 Jenis	450,000,000
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana	1 Kali	51,100,000
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	85%	851,236,400
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang terlaksana	436 Kali	69,986,400
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	436 Kali	781,250,000

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD		Persentase Pelayanan Sekertariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang tercapai	85%	17,789,777,100
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	85%	17,789,777,100
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	85%	3,541,000,000
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah agenda penyusunan dan pembahasan perda yang terlaksana	5 Kali	820,000,000
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terbentuk	19 Raperda	2,000,000,000
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang terlaksana	5 Kali	711,000,000
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tata tertib DPRD yang tersusun	1 Tatib	10,000,000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase jumlah perda yang dibahas	85%	75,000,000
		Pembahasan APBD	Jumlah jadwal pembahasan APBD yang dilakukan	1 Perda	25,000,000
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah jadwal pembahasan APBD perubahan yang dilakukan	1 Perda	25,000,000
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah jadwal pembahasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan	1 Perda	25,000,000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keputusan dan Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	85%	45,000,000
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah keputusan DPRD yang dibuat	1 Keputusan DPRD	25,000,000

		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi DPRD yang dihasilkan	1 Rekomendasi DPRD	20,000,000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya	85%	3,158,625,000
		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK	45 Anggota	2,581,500,000
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi yang tersusun	10 Jenis	70,125,000
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	10 Tenaga Ahli	315,000,000
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	7 Tenaga Ahli	192,000,000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap dan terhimpun	85%	1,587,157,100
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang terlaksana	576 Kali	-
		Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Usulan Pokok Pikiran Dewan yang terakomodir	45 Usulan	50,157,100
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan reses secara berkala (per semester)	135 Anggota	1,537,000,000
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang terlaksana	85%	650,000,000
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	300 Kali	650,000,000
		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas pimpinan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	85%	8,732,995,000
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas anggota DPRD yang terkoordinasi dan terkonsultasikan	168 Kali	8,732,995,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan APBD - PAK)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian

kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi

instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori (%)	Sumber Data
Setelah Perubahan								
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang		Indeks Pelayanan Publik (IPP)					
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	A	100	Baik	Inspektorat

	Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase Pelayanan Anggota DPRD yang tercapai	85%	85.85	107	Sangat baik	e-tepra
--	-------------	---	---	-----	-------	-----	-------------	---------

NB: Disajikan Tujuan dan Sasaran setelah Perubahan

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan di tahun 2022 **baik**. Di tahun 2022, Sekretariat DPRD tahun 2022 telah merencanakan 2 target kinerja yaitu meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah dengna target A dan meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD dengan target 85%, sedangkan setelah dilakukan pengukuran kinerja, indeks di akhir tahun 2022 memperoleh realisasi kinerja A atau realisasi capaian kinerja 100 (nilai SAKIP yang diterima sesuai dengan target). Begitupun dengan target meningkatnya kualitas pelayanan sebesar 85% dan di akhir tahun memperoleh realisasi sebesar 85.85 atau capaian kinerja 104.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)						
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	A	100	A	A	100

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase Pelayanan Anggota DPRD yang tercapai	80%	83,22	104	85%	85.85	107
--	---	---	-----	-------	-----	-----	-------	-----

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 2 indikator utama pada tahun 2020 dengan tahun 2022 tidak bisa disandingkan atau dibandingkan disebabkan ada nya perubahan indikator pada tahun 2022.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)			
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	A	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase Pelayanan Anggota DPRD yang tercapai	85.85	90	95.38%

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)				a. Penatausahaan Barang Milik Daerah terlaksana dengan baik b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor serta penyediaan Barang cetakan dan penggandaan terlaksana dengan baik c. Kegiatan anggota DPRD dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman luas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD sudah terfasilitasi dengan baik d. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan prioritas e. Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapan untuk anggota DPRD f. Keikutsertaan aparatur pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	A	100%	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase Pelayanan Anggota DPRD yang tercapai	85%	79.5%	93.53%	

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Anggaran, Program dan Kegiatan

NO	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp)	(%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	151,000,000	33,755,200	22.35%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD	51,000,000	39,958,500	78.35%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,000,000	20,454,000	40.11%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,428,843,559	2,274,153,461	93.63%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	99,000,000	59,514,000	60.12%
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	80,133,000	53,776,550	67.11%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	77,242,500	31,167,500	40.35%
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	79,438,000	11,871,000	14.94%
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,000,000	19,140,000	95.70%
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	251,000,000	124,866,275	49.75%
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,999,700	28,532,250	92.04%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,000,000	38,572,200	94.08%

13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266,276,800	195,904,000	73.57%
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	204,996,750	189,332,000	92.36%
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60,000,000	7,040,000	11.73%
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,500,000	51,770,200	98.61%
17	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,436,958,000	1,267,500,000	52.01%
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70,000,000	68,109,600	97.30%
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184,646,000	183,924,000	99.61%
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	119,035,400	97,431,000	81.85%
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238,773,600	173,170,891	72.53%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340,000,000	320,600,000	94.29%
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	649,999,600	632,705,663	97.34%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260,000,000	189,467,100	72.87%
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165,973,000	157,938,000	95.16%
26	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23,939,850,747	22,573,044,683	94.29%
27	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	450,000,000	415,877,544	92.42%
28	Pelaksanaan Medical Checkup DPRD	51,100,000	17,603,872	34.45%
29	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	69,986,400	68,183,270	97.42%

30	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	781,250,000	712,514,900	91.20%
31	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	820,000,000	378,398,367	46.15%
32	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2,000,000,000	1,317,715,816	65.89%
33	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	711,000,000	283,554,429	39.88%
34	Penyusunan Tata Tertib DPRD	10,000,000	4,655,000	46.55%
35	Pembahasan APBD	25,000,000	20,971,500	83.89%
36	Pembahasan APBD Perubahan	25,000,000	19,155,000	76.62%
37	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	25,000,000	19,125,000	76.50%
38	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	25,000,000	21,125,000	84.50%
39	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	20,000,000	19,125,000	95.63%
40	Pendalaman Tugas DPRD	2,581,500,000	1,854,697,026	71.85%
41	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	70,125,000	51,300,000	73.16%
42	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	315,000,000	241,800,000	76.76%
43	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	192,000,000	126,000,000	65.63%
44	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	0.00	0.00	0.00%
45	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50,157,100	3,698,000	7.37%
46	Pelaksanaan Reses	1,537,000,000	768,176,900	49.98%
47	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	650,000,000	642,753,500	98.89%
48	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8,732,995,000	8,374,308,957	95.89%
JUMLAH		51,491,780,156	44,204,437,154	85.85%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja, Anggaran, Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Setelah Perubahan										
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Publik (IPP)							
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	A	100	A	A	100	-
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD	Persentase Pelayanan Anggota DPRD yang tercapai	85%	79.5%	93.53%	17,789,777,100	14,146,559,495	79,52%	5.48%

Dari uraian tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dengan sasaran strategis *"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD"* dengan target IKM 85 dengan realisasi 79.5% atau capaian 93.53% dengan anggaran Rp. 17.789.777.100,- dengan realisasi Rp. 14.146.559.495,- atau capaian 79.52% dengan tingkat efisiensi mencapai 5.48% dengan kategori **BAIK**.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dengan sasaran strategis *"Meningkatnya Nilai AKIP perangkat daerah"* sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu nilai SAKIP "A".

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan hasil Pengukuran, tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dimana terdiri dari 2 (dua) Program Kegiatan yaitu 1 program kegiatan yang bersifat rutin dan 1 (satu) Program Kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD, dengan kategori capaian sasaran **Baik**.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 51.491.780.156,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 44.204.437.154,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 85.85% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 5.48%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* atau pun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 8 Februari 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN**

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691104 199003 1 005

LAMPIRAN



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASRUKIN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H.BADDRUT TAMAM, S.Psi**

Jabatan : Bupati Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pamekasan, 15 Januari 2022

Pihak kedua
Bupati Pamekasan

Pihak Pertama
Sekretaris DPRD Kab. Pamekasan

H.BADDRUT TAMAM, S.Psi

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi setiap Kegiatan Anggota DPRD	Indeks Pelayanan Publik	85 %

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 32.538.680.957	APBD
2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 21.290.777.100	APBD
JUMLAH		Rp. 53.829.458.057	APBD

Pihak kesatu
Sekretaris DPRD
Kab.PAMEKASAN

Pamekasan, 15 Januari 2022
Pihak Pertama,
Sekretaris DPRD Kab Pamekasan

H.BADDRUT TAMAM, S.Psi

MASRUKIN, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Kabupaten No. 107 TELP. (0324) 321327

PAMEKASAN 69321

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 188/10.A/432.100/2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Matrik Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada tanggal : 6 Januari 2020

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN**



MASRUKIN, S.Sps, M.Si
Pembina Muda
NIP. 196911041990031005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/10.A/432.100/2020
TANGGAL : 6 Januari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Insatansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan
- Tujuan : Mewujudkan Dukungan layanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD
- Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretaritan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD
b. Penyelenggaraan administrasi DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

KINERJA UTAMA 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN 3	SUMBER DATA 4	PENANGGUNG JAWAB 5
1. Meningkatkan Tata Kelola Pendukung Pelaksanaan Layanan Urusan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	$\left(\frac{\text{nilai P01} + \text{nilai P02} + \text{nilai P03}}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}$ <p>Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$ Nilai Indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$</p>	1. Desk evaluation; 2. Observasi lapangan; 3. Kuesioner dan/atau; 4. Wawancara.	Data Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan masyarakat (DPRD)	<p>$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$</p> $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Peringkat Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terjadi}} \times \text{Nilai Perimbangan}$ <p>SKM Unsur Pelayanan x 25</p>	Kuisisioner Data	Sekretariat DPRD
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	>80-90 (A)	LHE SAKIP OPD	Sekretariat DPRD

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PAMEKASAN

SEKRETARIAT DPRD

MASRUHIN, S.Sos., M.Si
Pemerintahan Muda
NIP. 1980-1041990031005

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																			Formulir RKPA-BELANJA SKPD									
Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022																												

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD				48,801,436,756	2,690,343,400	0	0	51,491,780,156	48,801,436,756	2,690,343,400	0	0	51,491,780,156	0	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31,011,659,656	2,690,343,400	0	0	33,702,003,056	31,011,659,656	2,690,343,400	0	0	33,702,003,056	0	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				253,000,000	0	0	0	253,000,000	253,000,000	0	0	0	253,000,000	0	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		151,000,000	0	0	0	151,000,000	151,000,000	0	0	0	151,000,000	0	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,000,000	0	0	0	51,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000	0	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,000,000	0	0	0	51,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000	0	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,764,657,059	0	0	0	2,764,657,059	2,764,657,059	0	0	0	2,764,657,059	0	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,428,843,559	0	0	0	2,428,843,559	2,428,843,559	0	0	0	2,428,843,559	0	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Semua Kabupaten/Kota,		99,000,000	0	0	0	99,000,000	99,000,000	0	0	0	99,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kuangan SKPD (Sekretariat DPRD)	(PAD)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,133,000	0	0	0	80,133,000	80,133,000	0	0	0	80,133,000	0	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,242,500	0	0	0	77,242,500	77,242,500	0	0	0	77,242,500	0	
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79,438,000	0	0	0	79,438,000	79,438,000	0	0	0	79,438,000	0	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				251,000,000	0	0	0	251,000,000	251,000,000	0	0	0	251,000,000	0	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		251,000,000	0	0	0	251,000,000	251,000,000	0	0	0	251,000,000	0	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				655,773,250	0	0	0	655,773,250	655,773,250	0	0	0	655,773,250	0	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		30,999,700	0	0	0	30,999,700	30,999,700	0	0	0	30,999,700	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	0	0	0	41,000,000	0	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		266,276,800	0	0	0	266,276,800	266,276,800	0	0	0	266,276,800	0	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		204,996,750	0	0	0	204,996,750	204,996,750	0	0	0	204,996,750	0	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,500,000	0	0	0	52,500,000	52,500,000	0	0	0	52,500,000	0	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				72,109,100	2,619,494,900	0	0	2,691,604,000	72,109,100	2,619,494,900	0	0	2,691,604,000	0	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61,785,000	2,375,173,000	0	0	2,436,958,000	61,785,000	2,375,173,000	0	0	2,436,958,000	0	
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua		10,056,000	59,944,000	0	0	70,000,000	10,056,000	59,944,000	0	0	70,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Kecamatan, Semua Kelurahan													
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		268,100	184,377,900	0	0	184,646,000	268,100	184,377,900	0	0	184,646,000	0	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				697,809,000	0	0	0	697,809,000	697,809,000	0	0	0	697,809,000	0	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		119,035,400	0	0	0	119,035,400	119,035,400	0	0	0	119,035,400	0	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			238,773,600	0	0	0	238,773,600	238,773,600	0	0	0	238,773,600	0	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		340,000,000	0	0	0	340,000,000	340,000,000	0	0	0	340,000,000	0	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,005,124,100	70,848,500	0	0	1,075,972,600	1,005,124,100	70,848,500	0	0	1,075,972,600	0	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		649,999,600	0	0	0	649,999,600	649,999,600	0	0	0	649,999,600	0	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		189,151,500	70,848,500	0	0	260,000,000	189,151,500	70,848,500	0	0	260,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		165,973,000	0	0	0	165,973,000	165,973,000	0	0	0	165,973,000	0	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				24,440,950,747	0	0	0	24,440,950,747	24,440,950,747	0	0	0	24,440,950,747	0	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,939,850,747	0	0	0	23,939,850,747	23,939,850,747	0	0	0	23,939,850,747	0	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		450,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	0	0	0	450,000,000	0	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,100,000	0	0	0	51,100,000	51,100,000	0	0	0	51,100,000	0	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD				851,236,400	0	0	0	851,236,400	851,236,400	0	0	0	851,236,400	0	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69,986,400	0	0	0	69,986,400	69,986,400	0	0	0	69,986,400	0	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		781,250,000	0	0	0	781,250,000	781,250,000	0	0	0	781,250,000	0	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				17,789,777,100	0	0	0	17,789,777,100	17,789,777,100	0	0	0	17,789,777,100	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3,541,000,000	0	0	0	3,541,000,000	3,541,000,000	0	0	0	3,541,000,000	0	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		820,000,000	0	0	0	820,000,000	820,000,000	0	0	0	820,000,000	0	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		711,000,000	0	0	0	711,000,000	711,000,000	0	0	0	711,000,000	0	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				3,158,625,000	0	0	0	3,158,625,000	3,158,625,000	0	0	0	3,158,625,000	0	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,581,500,000	0	0	0	2,581,500,000	2,581,500,000	0	0	0	2,581,500,000	0	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70,125,000	0	0	0	70,125,000	70,125,000	0	0	0	70,125,000	0	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		315,000,000	0	0	0	315,000,000	315,000,000	0	0	0	315,000,000	0	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pamekasan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		192,000,000	0	0	0	192,000,000	192,000,000	0	0	0	192,000,000	0	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				1,587,157,100	0	0	0	1,587,157,100	1,587,157,100	0	0	0	1,587,157,100	0	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kelurahan		50,157,100	0	0	0	50,157,100	50,157,100	0	0	0	50,157,100	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses (Sekretariat DPRD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,537,000,000	0	0	0	1,537,000,000	1,537,000,000	0	0	0	1,537,000,000	0	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah				650,000,000	0	0	0	650,000,000	650,000,000	0	0	0	650,000,000	0	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		650,000,000	0	0	0	650,000,000	650,000,000	0	0	0	650,000,000	0	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				8,732,995,000	0	0	0	8,732,995,000	8,732,995,000	0	0	0	8,732,995,000	0	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Sekretariat DPRD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,732,995,000	0	0	0	8,732,995,000	8,732,995,000	0	0	0	8,732,995,000	0	